

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENYALURAN KREDIT PADA PD. BPR
ROKAN HULU**

KARYA ILMIAH

Oleh :

**BUSTAMI
NIM.1224002**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
KABUPATEN ROKAN HULU
2016**

LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit Pada PD. BPR Rokan Hulu”

Karya Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan
Studi Sarjana (S-1) di Universitas Pasir Pengaraian

Oleh:

Bustami
NIM. 1224002

Ditetapkan dan Disahkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 30 Juni 2016

Oleh:

Pembimbing I,



Nofrianty, SE, M. Si
NIDN. 1028087804

Pembimbing II,



Sri Yunawati, M. Acc
NIDN. 1009018501

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sri Yunawati, M. Acc
NIDN. 1009018501

Surat Pernyataan Sumber Tulisan Artikel Ilmiah

Saya yang menandatangani surat pernyataan ini:

Nama : Bustami

NIM : 1224002

- 1) Menyatakan bahwa artikel ilmiah yang saya tuliskan benar bersumber dari kegiatan penelitian/perencanaan yang telah dilakukan sendiri oleh penulis bukan oleh pihak lain.
- 2) Naskah ini belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2016

Yang Membuat Pernyataan,

Pembimbing I,



Bustami
NIM. 1224002

Nofrianty, SE, M. Si
NIDN. 1028087804

Menyetujui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Hj. Sri Yunawati, M.Acc
NIDN. 1009018501

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENYALURAN KREDIT PADA PD. BPR ROKAN HULU

Bustami

Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian

Email : Bustamitam@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang berfokus pada sistem pengendalian intern penyaluran kredit pada PD. BPR Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data tentang komponen-komponen sistem pengendalian intern dari hasil dokumen, dan menghitung hasil keusioner menggunakan rumusan champion. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh PD. BPR Rokan Hulu berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang diperoleh adalah sebesar 92,90% yaitu berada dalam rentang 76% - 100% atau penerapan pengendalian intern sangat efektif dalam menunjang prosedur penyaluran kredit, dan telah memenuhi kelima komponen sistem pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Kata Kunci : Pengendalian Intern, Penyaluran Kredit

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the internal control system in lending conducted by PD. BPR Rokan Hulu. This research was conducted by analyzing data on the components of internal control systems of the outcome document, and calculate results using formulas keusioner champion. Results of analysis showed that the credit delivery system carried by the PD. BPR Rokan Hulu has been supported by the implementation of the internal control system which is very effective, based on the results of the questionnaire answers obtained amounted to 92.90% which is within the range of 76% - 100% or the application of internal control is very effective in supporting lending procedures, and has met the five components of internal control systems, namely the control environment, risk interpretation, control activities, information and communication, and monitoring.

Keyword : Internal Control, Lending

1. PENDAHULUAN

Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia memerlukan keadaan ekonomi stabil yang dapat membantu memperlancar usaha pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan. Kondisi ekonomi yang stabil juga memudahkan pemerintah dalam mengevaluasi rencana pembangunan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998).

Tugas pokok perbankan Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan

kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya berazaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat, maka usaha bank salah satunya adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Dalam aktivitas pemberian kredit kepada masyarakat, maka bank akan memperoleh bunga, komisi atau provisi, sebagai pendapatan bank. Dengan demikian bank tentunya akan berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah dengan cara memperbesar dana, memperluas pemberian kredit dan jasa-jasa bank lainnya, serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Kredit adalah kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan pertukaran suatu janji untuk membayar di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit mengandung unsur kepercayaan dan unsur waktu. Kepercayaan disini maksudnya adalah adanya kepercayaan dari

pemberi kredit (bank) kepada pihak penerima kredit (debitur) akan kemampuan debitur dalam memenuhi janji untuk membayar hutangnya. Sedangkan unsur waktu disini maksudnya adalah adanya janji debitur untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pihak kreditur selalu mempunyai resiko adanya piutang tak tertagih atau kredit macet. Untuk menghindari tingginya jumlah piutang tak tertagih atau kredit macet diperlukan adanya sistem dan prosedur yang harus dilaksanakan.

Dalam upaya penyaluran kredit usaha suatu lembaga perbankan perlu mempunyai prosedur sistem pengendalian intern yang baik. Sistem pengendalian intern pada prosedur penyaluran kredit sangat membantu pihak perbankan dalam menghindari resiko piutang tak tertagih atau kredit macet secara dini. Adapun sistem pengendalian intern pada prosedur penyaluran kredit tidak hanya tergantung pada sedikit banyaknya tahapan yang dilalui oleh calon debitur, akan tetapi lebih kepada apakah tahapan yang harus dilalui tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar.

Adapun syarat-syarat pengendalian intern yang baik adalah struktur organisasi yang mengadakan pemisahan fungsi dan tanggung jawab secara tepat, sistem otorisasi yang tepat dan prosedur pencatatan yang memadai dan dapat memberikan pengawasan yang layak terhadap aktiva, hutang, pendapatan, biaya dan praktek yang sehat yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

PD. BPR Rokan Hulu adalah salah satu lembaga keuangan bank yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Rokan Hulu yang saham sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan kabupaten Rokan Hulu. Dasar pendirian PD. BPR Rokan Hulu adalah Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 03 tahun 2007 tentang pendirian PD. BPR Rokan Hulu serta Surat Keputusan Bank Indonesia No. 9/33/KEP.GBI/DP9/2007, tentang Izin Operasional Bank PD. BPR Rokan Hulu.

PD. BPR Rokan Hulu telah berkembang sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam mewujudkan dan mengembangkan usahanya. Keberadaan PD. BPR Rokan Hulu sangat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah kabupaten Rokan Hulu.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PD. BPR Rokan Hulu memiliki prosedur dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, yang harus

diikuti dalam mengajukan kredit selain itu dalam proses penyaluran kredit juga perlu dilakukan analisis terhadap pengajuan kredit oleh setiap calon nasabah atau peminjam. Hal ini tentunya dapat mencegah atau mengurangi jumlah piutang tak tertagih atau kredit macet pada PD. BPR Rokan Hulu.

Kolektibilitas kredit menurut surat edaran Bank Indonesia nomor: 29/12/BPPP/2004 ada lima kriteria, kolektibilitas kredit yaitu: kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Berikut ini adalah daftar posisi kredit pada tahun 2013 – 2015.

Tabel 1.1
Daftar Posisi Kredit Pada PD. BPR Rokan Hulu
Per 31 desember 2013-2015

Kolektibilitas	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Lancar	19.750.602.000	20.024.486.000	22.593.345.000
Kurang Lancar	441.604.000	505.471.000	156.371.000
Diragukan	936.940.000	288.751.000	631.461.000
Macet	1.025.629.000	1.490.704.000	2.089.042.000
Total	22.154.775.000	22.309.412.000	25.470.219.000

Sumber : PD. BPR Rokan Hulu, 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa adanya potensi untuk terjadinya kredit macet pada PD. BPR Rokan Hulu pada tahun 2015.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit Pada PD. BPR Rokan Hulu**”.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2008 : 163) sistem pengendalian intern adalah suatu jaringan yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen

Menurut *The Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) dalam Anatasia (2011 : 83) sistem pengendalian intern memiliki lima komponen utama sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian
Merupakan tanggung jawab manajemen untuk menegaskan bahwa integritas merupakan nilai

suatu organisasi dan bahwa aktivitas tidak etis tidak dapat ditoleransi.

Faktor yang mencakup lingkungan pengendalian:

- Integritas dan nilai etika organisasi
 - Komitmen terhadap kompetensi
 - Komite audit dan dewan direksi
 - Filosofi dan gaya hidup operasi manajemen
 - Struktur organisasi
 - Pemberian wewenang
 - Kebijakan dan praktek sumber daya manusia
- b. Penilaian Resiko
- Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang bisa menimbulkan resiko bagi perusahaan dan harus menentukan bagaimana mengelola resiko tersebut.
- c. Aktivitas Pengendalian
- Untuk mengurangi terjadinya penyelewengan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk menghadapi resiko tertentu yang dihadapi perusahaan.
- d. Informasi dan komunikasi
- Sistem pengendalian intern harus mengomunikasikan semua informasi penting ke semua lapisan dalam organisasi, baik ke bawah maupun ke atas, serta mengomunikasikan informasi ke pihak ekstern yang sesuai.
- e. Pengawasan atau pemantauan
- Sistem pengendalian intern harus memonitor secara periodik dengan memadai. Penyimpangan yang signifikan harus dilaporkan kepada manajemen puncak atau dewan komisaris.

Prinsip-prinsip pemberian kredit dilakukan dengan analisa 5C (Kasmir, 2012 : 101), yaitu sebagai berikut:

1. *Character* adalah sifat atau watak seseorang (calon debitur). Maksudnya orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaannya maupun bersifat pribadi.
2. *Capacity* adalah untuk melihat kemampuan calon debitur dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Serta kemampuannya dalam mengelola bisnis tersebut. Pada akhirnya akan dilihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah (modal) terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. *Condition* yaitu dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor ekonomi masing-masing.

2.2. Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit

Menurut Mulyono sistem pengendalian intern pemberian kredit adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain, dalam usahanya untuk menjaga kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang efektif dan efisien, menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan, serta penyusunan laporan keuangan yang andal (Budiyati : 2008).

a. Tahap Prakarsa dan Analisa Kredit

Analisis dan evaluasi kredit dituangkan dan sesuai dengan jenis kreditnya sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Identitas pemohon, informasi mengenai identitas dimaksudkan untuk melihat gambaran awal penanggung jawab utama.
- b. Tujuan permohonan kredit, mencakup jumlah kredit, objek yang dibiayai, jangka waktu kredit dan mengenai tujuan kredit ini dimaksudkan.
- c. Riwayat hubungan bisnis dengan bank, mencakup saat mulai bidang hubungan bisnis, kualitas hubungan bisnis, dan jumlah total nilai hubungan bisnis.
- d. Analisis 5C kredit, mencakup analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis prospek usaha, dan analisis angsuran kredit.

b. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Pejabat pemutus memeriksa dan meneliti kelengkapan paket kredit. Berdasarkan analisa dan evaluasi kredit yang dibuat oleh pejabat rekomendasi, pejabat pemutus memberikan keputusan atas paket kredit tersebut, dan harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir putusan kredit, dan selanjutnya paket kredit diserahkan kepada administrasi kredit untuk dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan surat penawaran putusan kredit kepada pemohon yang memuat struktur dan tipe kredit serta syarat-syarat ketentuan kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah. Apabila pemohon

menyetujui persyaratan dan ketentuan tersebut maka pemohon harus menandatangani surat putusan tersebut diatas materai dan mengembalikan ke bank.

2. Mempersiapkan dokumen perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.
3. Mempersiapkan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian mendukung menjamin perjanjian pokoknya.
4. Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pencairan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu Pasir Pengaraian yang beralamat di jalan Tuanku Tambusai Komplek Pasar Modern Kampung Padang Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan secara terperinci keadaan serta kondisi dari suatu objek penelitian, (Maunah, 2010 : 9). Penelitian ini dilakukan pada PD. BPR Rokan Hulu tahun 2015.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dalam hal ini adalah kuesioner yang diberikan kepada responden yang relevan dengan penelitian ini, yaitu kuesioner yang diberikan pada bagian kepala seksi kredit, *customer service* kredit, analisa kredit, administrasi kredit, remedial kredit, penagihan kredit dan *teller*.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari perusahaan, yaitu terdiri dari struktur organisasi, SOP perkreditan dan daftar kolektibilitas kredit tahun 2013-2015.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan dua cara sebagai berikut :

1. Kuesioner

Adalah suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai masalah yang akan diteliti.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyebarkan kuesioner kepada responden yang terkait dengan penyaluran kredit di PD. BPR Rokan Hulu. Penulis menyediakan jawaban secara "*close ended questioner*" atau kuesioner secara tertutup, yaitu responden hanya memberi tiga alternatif jawaban yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis yaitu "Ya", "Tidak" atau "Tidak Relevan". Sebagai ukuran tingkat kesesuaian dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga responden cukup memilih salah satu jawaban yang dianggap paling cocok menurut responden dari ketiga alternatif jawaban tersebut.

2. Dokumentasi

Adalah dengan cara meminta dokumen seperti struktur organisasi, SOP perkreditan, memorandum usulan kredit, dan laporan analisa jaminan.

3.5. Teknik Analisis Data

Setelah kuesioner terkumpulkan seluruhnya penulis melakukan analisis dengan cara :

1. Menghitung hasil jawaban kuesioner
2. Menghitung hasil jawaban dengan menggunakan rumusan Champion dalam Amirah Ahmad (2013 : 40), yang dikutip dalam bukunya *Basic Statistic For Social Research* adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$

3. Menginterpretasikan hasil perhitungan kedalam persentase sebagai berikut :
 1. 0% - 25% = penerapan pengendalian internal tidak efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
 2. 26% - 50% = Penerapan pengendalian internal kurang efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
 3. 51% - 75% = Penerapan pengendalian internal cukup efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.
 4. 76% - 100% = Penerapan pengendalian internal sangat efektif dalam menunjang prosedur pemberian kredit.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit

Berikut rangkuman hasil dokumen Standar Operasional Perbankan (SOP) Perkreditan mengenai efektivitas penerapan sistem pengendalian intern penyaluran kredit pada PD. BPR Rokan Hulu.

Dalam melaksanakan proses penyaluran kredit, PD. BPR Rokan Hulu telah menerapkan komponen sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian
1. Integritas dan etika
PD. BPR Rokan Hulu sangat menjunjung tinggi integritas. PD. BPR Rokan Hulu memiliki kebijakan dan prosedur penyaluran kredit dan hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten dibuktikan dengan pengalaman, objektivitas, dan tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil. Selain itu, PD. BPR Rokan Hulu juga memiliki kode etik yang mengatur tentang perilaku. Seorang Bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, seorang Bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.
 2. Komitmen terhadap Kompetensi
Kompetensi menjadi pertimbangan manajemen untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada PD. BPR Rokan Hulu. Kompetensi merupakan suatu pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan. Adanya uraian tugas (*job description*) yang menguraikan tugas tertentu menjadi salah bukti komitmen manajemen kompetensi para pegawai atau karyawannya, seperti PD. BPR Rokan Hulu memiliki flowchart prosedur penyaluran kredit yang dipahami oleh setiap karyawan yang berada di sana.
 3. Dewan Direksi dan Komite Audit
Dewan direksi adalah wakil dari pemegang saham, yang diangkat dan diberhentikan oleh pemilik baik secara langsung maupun melalui rapat umum pemegang saham, Dilakukannya Komite Audit oleh Pejabat Kredit yang bertanggung jawab secara langsung membantu Direksi dalam merumuskan kebijaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi portopolio serta memberikan saran-saran langkah perbaikan di bidang perkreditan. Sehingga di percayai oleh masyarakat memiliki kekuatan yang independen dalam melindungi keuangan yang dilakukan oleh manajemen.
 4. Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi
Filosofi dalam bidang perkreditan berdiri di atas kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, karyawan bank harus menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada bank. Dengan kata lain, falsafah manajemen yang dipegang oleh PD. BPR Rokan Hulu adalah melayani kredit kepada seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan gaya operasi yang diterapkan merupakan suatu tindakan partisipatif, hal ini tercermin dari peletakan perencanaan dan pengendalian ditangan manajemen menengah ke bawah. Maka dapat dikatakan, falsafah manajemen dan gaya operasi yang diterapkan oleh PD. BPR Rokan Hulu telah memadai.
5. Struktur Organisasi
Struktur organisasi pada PD. BPR Rokan Hulu telah disusun dengan baik yang ditandai dengan adanya pembagian bidang di bidang perkreditan.
 6. Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab
Pelimpahan otorisasi dan tanggung jawab pada PD. BPR Rokan Hulu cukup memadai, terlihat dari adanya pelimpahan tanggung jawab, pendelegasian wewenang serta adanya kebijakan-kebijakan yang dilengkapi tanggung jawab serta pengawasannya melalui peraturan-peraturan.
 7. Kebijakan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Komponen kebijakan dan pelatihan SDM telah diterapkan memadai oleh PD. BPR Rokan Hulu. Hal ini terbukti dengan adanya sistem penerimaan karyawan, pendidikan dan pelatihan serta mutasi dan promosi jabatan sebagai penghargaan terhadap prestasi karyawan.
- b. Penaksiran Risiko
- Komponen penaksiran risiko telah dilaksanakan dengan baik, artinya PD. BPR Rokan Hulu sangat memperhatikan risiko yang berkaitan dengan prosedur perkreditan seperti risiko yang timbul karena penempatan karyawan baru, pertumbuhan pemberian kredit, investasi, teknologi baru, serta adanya perluasan kegiatan operasional bank dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang baru. Demikian pula denganantisipasi risiko kredit macet, PD. BPR Rokan Hulu berupaya mentaati peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang merupakan prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.
- c. Aktivitas Pengendalian
- a. Pemisahan tugas yang memadai terlihat dari adanya pemisahan tugas yang menagani permohonan kredit oleh *customer service* kredit, analisis kredit, administrasi kredit, penagihan kredit kepala bagian kredit, dan komite kredit.
 - b. Pendelegasian wewenang secara wajar atas transaksi dan aktivitas, dalam hal ini hanya direktur yang berhak memutuskan permohonan kredit yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu atas analisa yang telah dilakukan oleh analisis kredit.
 - c. Dokumen dan catatan yang memadai telah dilakukan oleh PD. BPR Rokan Hulu, hal ini dapat terlihat dari lengkapnya persyaratan kredit yang diperlukan, sehingga akan

terlaksana keseragaman dalam penanganan proses pemberian kredit.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi pada PD. BPR Rokan Hulu telah dilaksanakan dengan baik dan memadai. Hal ini terlihat dengan dilaksanakannya sistem informasi baru yang bertujuan untuk dapat mengidentifikasi, menggabungkan, mencatat, menganalisis serta melaporkan transaksi yang sesuai dengan kelengkapannya dan ketepatannya juga diikhtisarkan dengan benar dan tepat.

e. Pemantauan

Pemantauan aktivitas kredit PD. BPR Rokan Hulu telah memadai, karena PD. BPR Rokan Hulu telah melakukan aktivitas pemantauan kredit kepada pihak intern BPR yaitu sebagai berikut:

- a. Memantau dan mengawasi kesesuaian proses pemberian kredit dan penagihan dengan kebijakan, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- b. Memastikan bahwa jumlah yang diberikan tidak melanggar atau melampaui BMPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mengevaluasi kebijakan, prosedur, dan organisasi dan manajemen perkreditan secara menyeluruh.

d. Mengawasi perilaku pegawai perkreditan dan melaporkan kepada pejabat, kepada direksi apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai perkreditan.

Sedangkan pemantauan kredit kepada pihak ekstern PD. BPR Rokan Hulu yaitu sebagai berikut:

- a. Memantau perkembangan usaha nasabah melalui kegiatan kunjungan ke lokasi usaha dan angunan nasabah sewaktu-waktu dengan didasarkan pada kriteria kualitas jenis usaha nasabah.
- b. Memberikan peringatan dini secara tertulis kepada nasabah apabila terjadi penurunan kualitas kredit nasabah yang diperkirakan memiliki resiko bagi PD. BPR Rokan Hulu.
- c. Mencari informasi ekstern berupa laporan berkala, melakukan inspeksi *on the spot* dan laporan akuntan tentang perkembangan ekonomi dan kegiatan usaha nasabah serta nasabah yang beresiko tinggi.

Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai efektifitas sistem pengendalian intern pemberian kredit PD. BPR Rokan Hulu berdasarkan lima komponen sistem pengendalian intern yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang diberikan kepada kepala seksi kredit, *customer service* kredit, analisa kredit, administrasi kredit,

remedial kredit, penagihan kredit dan *teller* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jawaban Kuesioner “Efektifitas Penerapan Pengendalian Intern Penyaluran Kredit Pada PD. BPR Rokan Hulu

No. Kuesioner	Jawaban			Total
	Ya	Tidak	Tidak Relevan	
1.	30	1	0	31
2.	30	1	0	31
3.	28	2	1	31
4.	27	3	1	31
5.	29	1	1	31
6.	31	0	0	31
7.	26	5	0	31
8.	26	3	2	31
9.	30	1	0	31
10.	31	0	0	31
Total	288	17	5	310

Sumber : data diolah

Hasil jawaban kuesioner tersebut kemudian dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban Kuesioner}} \times 100\% \\
 &= \frac{288}{310} \times 100\% \\
 &= 92,90\%
 \end{aligned}$$

Persentase yang diperoleh adalah sebesar 92,90% yaitu berada dalam rentang 76% - 100% yang artinya penerapan pengendalian intern sangat efektif dalam menunjang prosedur penyaluran kredit pada PD. BPR Rokan Hulu.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disajikan sebelumnya maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Proses analisis kredit dilakukan oleh PD. BPR Rokan Hulu dengan melakukan : pengkajian berkas-berkas permohonan, penyelidikan dan analisis kredit, keputusan permohonan kredit, realisasi fasilitas kredit. Proses ini telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh PD. BPR Rokan Hulu sehingga kredit yang dicairkan tepat sasaran. Sistem penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh PD. BPR

Rokan Hulu telah didukung oleh penerapan sistem pengendalian intern yang sangat efektif, dapat dilihat berdasarkan hasil jawaban kuesioner maka diperoleh persentase adalah sebesar 92,90% yaitu berada dalam rentang 76% - 100% yang artinya penerapan pengendalian intern sangat efektif dalam menunjang prosedur penyaluran kredit, dan telah menerapkan kelima komponen sistem pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

2. Secara umum, sistem penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh PD. BPR Rokan Hulu terdiri atas beberapa prosedur yaitu prosedur permohonan kredit, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengikatan kredit dan prosedur pencairan kredit.
3. PD. BPR Rokan Hulu dalam mencegah dan menangani kredit bermasalah, dengan upaya pemantauan atau monitoring usaha debitur secara berkala. Dan masing-masing unit atau divisi memiliki tugas dan wewenang yang jelas sehingga memudahkan para karyawan untuk melakukan tugasnya dengan benar dan baik.

5.2. Saran

1. Terkait dengan pengawasan yang perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan, untuk menghindari penyelewengan penyelewengan baik dari oknum ekstern maupun intern bank. Untuk menangani kredit, perlu perhatian yang ekstra karena penanganan yang buruk bisa berakibat pada likuiditas bank, sehingga dapat merugikan bank secara keseluruhan.
2. Tingkatkan kualitas pengendalian intern penyaluran kredit agar kredit bermasalah atau kredit macet dapat diminimalisasi sekecil mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amirah, 2013. *Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pembelian Kredit Pada PT Bank Mega Cabang Makasar*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Budisantoso Totok dan Nuritno, 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Budiyati, 2008. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Diana Anatasia dan setiawati, 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta:
- Ismail, 2010. *Akuntansi Bank*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir, 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Kasmir, 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Maunah Siti, 2011. *Analisis Pengendalian Internal Dalam Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Gradiska Candirejo*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri.
- Mulyadi, 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sugiyono, 2012. *Metode penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008).
- Pirdaus, 2013. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat*. Pasir Pengaraian: Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian.
- WinarnoWahyu Wing, 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP ITIM YKPN.